

Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard

Agus Nilmada Azmi¹, Febri Dirgantara H²
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ¹agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id, ²febri.dirgantara@uinjkt.ac.id*



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>
VOL. 4, NO. 1 (2023)

Page: 40 – 51

Recommended Citation (APA Style):

Agus Nilmada, A., & Dirgantara H, F. (2023). Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(1), 40–51.
<https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33364>

Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/33364>

Article History:

Received 18 Februari 2023
Accepted 01 Mei 2023
Available online 28 Juni 2023

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. This study discusses the policy influencer of Australia's policy towards asylum seekers during the reign of Julia Gillard from 2010-2013. These approaches incorporate the re-implementation of the Pacific Solution, the return of asylum seekers to their countries of origin, and the Malaysia Solution, beside other policies. This study uses the theory of policy influence system and prejudice theory in explaining the policies implemented by the government of Australia in managing with asylum seeker amid the reign of Julia Gillard and the components behind the policy-making. The analytical ranking used is the nation-state. This research is qualitative research with descriptive type. The results of this study indicate that Australia's policy towards asylum seekers under the Gillard government is influenced by three policy influencing factors, namely the bureaucracy, parties, and the public, which are full of negative prejudice against asylum seekers.

Keywords: Australian Foreign Policy, Asylum Seeker, Policy Influencer.

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang *policy influencer* dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard kurun waktu 2010-2013. Pendekatan ini mengikutsertakan penerapan kembali dari kebijakan Solusi Pasifik, pemulangan pencari suaka ke negara asalnya, dan Solusi Malaysia serta kebijakan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori sistem pengaruh kebijakan dan teori prasangka dalam menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka di tengah pemerintahan Julia Gillard dan komponen di balik pembuatan kebijakan. Peningkatan analitis yang digunakan adalah negara-bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka di bawah pemerintahan Gillard dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, yaitu birokrasi, partai, dan masyarakat, yang penuh dengan prasangka negatif terhadap pencari suaka.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan.

PENDAHULUAN

Australia menjadi salah satu negara yang menjadi sorotan karena dianggap mengaplikasikan kebijakan-kebijakan “kontroversial” terhadap pencari suaka selama dua dekade. Kebijakan tersebut terlihat dari adanya kontradiksi antara komitmen Australia terhadap penegakan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan kebijakan yang cenderung “punitif” dalam menangani permasalahan pencari suaka. Kebijakan punitif yang dimaksud adalah kecenderungan pemerintah Australia untuk menghukum para pencari suaka yang datang ke Australia melalui kebijakan-kebijakan yang ketat, seperti penahanan terhadap pencari suaka dalam masa pemrosesan status sebagai pengungsi baik secara *offshore* maupun *onshore* tanpa memberikan kesempatan bagi pencari suaka untuk melakukan *rights-based claims* (Lindh, 2015:11).

Bentuk kebijakan semacam ini berlawanan dengan ketentuan HAM yang mengaplikasikan proses legal secara konsisten untuk mendeterminasi status proteksi terhadap pencari suaka dengan tidak mendiskriminasi pencari suaka berdasarkan asal kedatangannya, waktu kedatangan, dan bagaimana mereka datang (Law Council of Australia, 2013).

Secara historis, Australia merupakan negara yang sejak masa sebelumnya telah berpengalaman dalam menerima pencari suaka dan pengungsi, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II. Di mana terdapat hingga 700.000 pencari suaka datang dan tinggal di Australia secara permanen hingga kini (Phillips, 2013: 2). Tidak berlebihan jika Australia dianggap sebagai salah satu negara maju yang memiliki keterbukaan terhadap arus kedatangan pencari suaka dan pengungsi. Hal ini juga didukung dengan diterapkannya kebijakan multikulturalisme sebagai pondasi kebijakan negara. (Refugee Council of Australia).

Australia juga salah satu negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik, sering menjadi target bagi para pencari suaka dari berbagai negara. Umumnya, ada dua macam pencari suaka yang tiba di Australia, dengan melintasi laut dan udara. Pencari suaka yang tiba dengan perahu dikenal sebagai “boat people” atau manusia perahu. Istilah “boat people” pada dasarnya mengacu pada pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu untuk mencari suaka dan diproses oleh otorita Australia di pulau luar wilayah Australia (Weber, 2015; www.aph.gov.au, 2013). Pencari suaka yang tiba mempergunakan perahu dianggap sebagai pencari suaka ilegal dan kemudian dipersepsikan sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) menurut *Department Immigration and Citizenship* (DIAC). (www.immi.gov.au, 2013).

Dibandingkan tahun 2010, total *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) meningkat cukup besar,

mencapai 6.555 orang. Angka tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Australia sejak tahun 1976, ketika kasus manusia perahu pertama kali muncul. Berikut data yang menggambarkan peningkatan IMAs di Australia antara tahun 1976-2012.

Tabel 1. Jumlah Boat People

Year	Number of boats	Number of people	
1976			111
1977			868
1978			746
1979			304
1980			0
1981			30
1982-88			0
Year	Number of boats	Number of people (excludes crew)	
1989	1		26
1990	2		198
1991	6		214
1992	6		216
1993	3		81
1994	18		953
1995	7		237
1996	19		660
1997	11		339
1998	17		200
1999	86		3721
2000	51		2939
2001	43		5516
2002	1		1
2003	1		53
2004	1		15
2005	4		11
2006	6		60
2007	5		148
2008	7		161
Year	Number of boats	Crew	Number of people (excludes crew)
2009	60	141	2726
2010	134	345	6555
2011	69	168	4565
2012	278	392	17 202
2013 (to 30 June)	196	407	13 108

Sumber: Parliamentary Library, Janet Phillips and Harriet Spinks, Boat arrivals in Australia since 1976, hal.22

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah IMAs di Australia meningkat mulai 2009, mencapai total 2.726. Pada 2010, jumlah IMAs meningkat menjadi 6.555. Kedatangan IMAs terbesar terjadi pada 2012 ketika 17.202 pencari suaka tiba di Australia dengan perahu. Julia Gillard, kebijakannya lebih mengarah untuk membatasi perbatasan dari arus masuk pencari suaka dengan mengimplementasikan kebijakan seperti mengembalikan pencari suaka ke negara asalnya, penahanan wajib (mandatory detention), dan *Pacific Solution* yang dianggap melanggar prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Pada Juli 2010, dalam sambutan pertama sebagai PM terpilih, Gillard menyebutkan akan mendirikan pusat pemrosesan bagi *boat people* sebagai “sarana” untuk

mengintimidasi mereka agar tidak menerobos wilayah Australia. Berikut ini pernyataan Julia Gillard:

"Building on the work already underway through the Bali Process, today I announce that we will begin a new initiative. In recent days I have discussed with President Ramos Horta of East Timor the possibility of establishing a regional processing center for the purpose of receiving and processing the irregular entrants to the region. The purpose would be to ensure that people smugglers have no product to sell. Arriving by boat would just be a ticket back to the regional processing center. It would be to ensure that everyone is subject to a consistent, fair, assessment process. It would be to ensure that arriving by boat does not give anybody an advantage in the likelihood that they would end up settling in Australia or other countries of the region." (<https://www.abc.net.au>, 2010).

Penjelasan Gillard di atas, dapat disimpulkan bahwa kedatangan semua *boat people* dianggap ilegal, meski faktanya mayoritas adalah pencari suaka yang kehadirannya harus diperhitungkan oleh negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. *Boat people* sebagian besar berasal dari negara konflik seperti Irak, Sri Lanka, Afganistan, dan Iran yang mayoritas untuk mencari suaka, meskipun ada juga beberapa yang tidak memiliki target yang sama karena mereka hanya bertugas sebagai kru. Padahal, dari penjelasan di atas, jelas bagi Julia Gillard bahwa subjek *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) adalah praktik perdagangan manusia atau penyelundupan manusia, bukan sebagai *asylum seeker* atau *refugee*.

Terdapat beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Misalnya, Hartley dan Pedersen mencoba menganalisis kebijakan Australia terhadap pencari suaka melalui prasangka dan emosi yang terkonstruksi di lingkungan Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia yang cenderung restriktif terhadap pencari suaka dipengaruhi oleh, salah satu dan utama, adanya prasangka (*prejudice*) dan respon-respon emosional-negatif (*emotional responses*) dari pemerintah maupun masyarakat umum terhadap pencari suaka (Hartley & Pedersen, 2015).

John Minns et.al menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan Australia terhadap para imigran dan pencari suaka merupakan bentuk kebijakan yang keras. Konsekuensi kebijakan tersebut akan berdampak pada masa depan hubungan Australia dengan negara-negara lain. Minns menjelaskan bahwa idealnya negara-negara maju, seperti Australia, mampu memberikan respons positif di tengah krisis migrasi di dunia internasional. Namun, ketika Australia justru menerapkan kebijakan negatif terhadap para imigran dan pencari suaka,

maka hal tersebut akan menciptakan benih-benih kebencian dan permusuhan dengan negara-negara yang bersangkutan pada masa-masa yang akan datang. Sebab itu, model kebijakan Australia terhadap para imigran dan pencari suaka bukanlah model ideal yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain (Minns, et.al, 2018).

Sementara Kindborg mencoba menganalisis kebijakan sekuritisasi Australia terhadap para pengungsi. Meskipun penelitian ini secara khusus mengkaji tentang migrasi, namun dalam penelitian ini, dalam beberapa bagian juga mengkorelasikan dengan isu pencari suaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sekuritisasi pemerintah Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka merupakan faktor yang mendorong munculnya tindakan-tindakan marginalisasi terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, sekuritisasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya diferensiasi antara "us" dan "them" yang berkembang secara luas di lingkungan masyarakat Australia secara umum. Maka pada tahap berikutnya, kebijakan sekuritisasi tersebut menjadi pelanggaran HAM (hak asasi manusia) terhadap para pengungsi dan pencari suaka (Kindborg, 2014).

Matthew Cameron menyebutkan bahwa kedatangan pencari suaka dengan perahu di Australia dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Australia. Bentuk ancaman ini didasarkan pada asumsi bahwa kedatangan pencari suaka merupakan bagian dari keterlibatan kejahatan transnasional yang terorganisir dalam bentuk penyelundupan manusia. Pandangan pemerintah yang demikian, kemudian menjadi alasan yang kuat terhadap hadirnya sejumlah kebijakan yang ketat terhadap pencari suaka (Cameron, 2013).

Sementara Tanzila berupaya mengungkap motivasi yang melatarbelakangi penerapan kebijakan sekuritisasi Australia terhadap *irregular maritime*, berkesimpulan bahwa penerapan kebijakan sekuritisasi itu dimotivasi oleh dua faktor utama. Pertama, pertimbangan keamanan Australia. *Irregular maritime* bagi negara Australia tak ubahnya ancaman negatif terhadap keamanan negara sebab imigran model ini dipersepsi sebagai imigran yang identik dengan kriminal dan berpotensi terjadinya penyelundupan manusia. Kedua, mengantisipasi gejala terorisme. Indikatornya adalah para *irregular maritime* pada tahun belakangan itu sampai terjadinya peristiwa Tampa, mayoritas, berasal dari negara-negara timur tengah yang diasumsikan sebagai negara konflik akibat meluasnya gerakan-gerakan teroris-radikal, seperti Afghanistan, Iraq, Iran, dan Sri Lanka. Faktor kedua ini juga mengindikasikan munculnya apa yang disebut dengan Islamophobia karena negara-

negara tersebut juga dipahami secara “taken for granted” oleh pemerintah Australia ketika itu sebagai negara Arab-Islam (Tanzila, 2015). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard tahun 2010-2013 dengan memusatkan perhatiannya pada analisa terhadap decision making process (DMP)nya.

Andrea Carson dkk menjelaskan bahwa pencari suaka merupakan tema yang kerap diangkat dalam diskusi dan perdebatan politik di Australia. Dengan memfokuskan pada respons para pemilih partai Liberal pada pemilu 2013 dengan Voting Engagement Application (VEA), temuan penelitian Carson menunjukkan bahwa (1) pencari suaka merupakan isu sentral di media internet dan pembicaraan para pemilih, (2) isu pencari suaka merupakan bagian penting dari kampanye partai Liberal dengan istilah-istilah merendahkan dan gambar tidak manusiawi, (3) melalui kampanye negatif terhadap pencari suaka, partai Liberal memperoleh keuntungan elektoral dalam pemilu tersebut (Carson et.al, 2016).

Sementara itu, Bolger dengan menganalisis politik ras dalam respon pemerintah Australia terhadap pencari suaka, menyatakan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka menunjukkan kontinuitas dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001, pencari suaka dan IMA khususnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan karenanya harus ditertibkan. Selain itu, ketika perlakuan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka menjadi semakin dipolitisasi, demarkasi antara pengungsi “baik” dan “asli” yang tiba melalui saluran resmi dan orang-orang perahu “ilegal” atau “tidak sah” yang tiba tanpa pemberitahuan, terus mempengaruhi masyarakat Australia. Dengan cara ini, kedatangan mereka yang mencari suaka dipahami sebagai cerminan dari keinginan untuk cara hidup yang lebih baik atau lebih mudah, daripada perjalanan kebutuhan (Bolger, 2016).

Terlihat bahwa Australia telah melanggar Konvensi Pengungsi 1951 dengan menerapkan kebijakan “punitif” terhadap pencari suaka yang datang dengan perahu. Sebagai otoritas tertinggi, tentu saja pemerintah Australia adalah pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Tetapi, pemerintah Australia sebagai pembuat kebijakan luar negeri tidak terlepas dari dinamika domestik yang mempunyai input dalam pengambilan kebijakan. Australia menggunakan “sistem pemerintahan terbuka”, itu sebabnya tahapan pengambilan kebijakan tentunya akan sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti siapa dan apa saja yang menjadi *policy influencer* dalam pendekatan

pemerintah Australia terhadap pencari suaka selama Julia Gillard 2010-2013, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan tersebut.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pemberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan Australia terkait para pencari suaka yang berasal dari laut. Bogdan dan Taylor menyebut penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014).

Tipe kualitatif diaplikasikan dalam bentuk penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena kebijakan Australia yang kurang mengikuti kesepakatan internasional dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait pencari suaka (Sujana dan Ibrahim, 1989). Penggunaan metode kualitatif deskriptif dapat menjelaskan permasalahan terkait dengan kebijakan Australia terhadap pencari suaka yang berasal dari laut pada masa pemerintahan Julia Gillard pada tahun 2010-2013.

Data-data yang diperlukan diidentifikasi dan dikumpulkan melalui alat pengumpul penelitian seperti wawancara, observasi, serta sumber data yang bersumber dari data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data verbal, data gambar, dan data tulisan. Data divalidasi dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lainnya. Data juga divalidasi melalui konsistensi jawaban dari wawancara ataupun observasi. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dilakukan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang ingin dicari melalui penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk dapat mendeskripsikan secara sistematis akan fakta dan karakter yang tersedia dalam suatu area yang menjadi pokok perhatian secara faktual dan seakurat mungkin. Laporan penelitiannya kemudian dituliskan berdasarkan keterwakilan partisipan, perspektif dan kerangka berfikir dari peneliti, menggambarkan suatu deskripsi kompleks serta interpretasi dari masalah dan kontribusinya dalam keliteraturan (Creswell, 2013).

KERANGKA KONSEPTUAL

Policy Influencer System

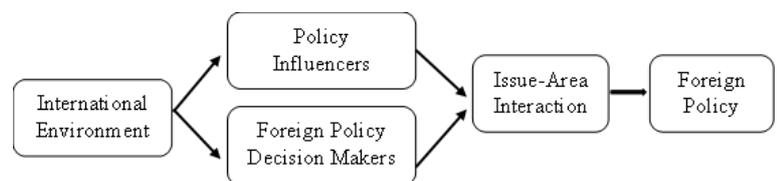
Penelitian ini menggunakan teori atau pendekatan William D. Coplin dalam menganalisis proses pengambilan kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard tahun 2010-2013. Coplin menjabarkan bahwa *policy influencer system* adalah pengambilan keputusan oleh aktor politik domestik di mana terdapat pihak yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*) dan pihak yang mengambil keputusan (*decision makers*). Keterkaitan antara *policy influencers* dengan *decision makers* terjadi dengan masing-masing pihak memberikan pengaruh ataupun tanggapan (*feedback*) dengan *decision makers* sebagai pengambil kebijakannya.

Policy influencers membutuhkan para pengambil keputusan (*decision makers*) karena *policy influencers* merupakan sumber dukungan para pengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan sebagai suatu produk (*output*) kebijakan, *policy influencers* mempengaruhi pengambil keputusan dengan masukan dan pandangannya sebagai pengaruh. Apabila aspirasi ataupun harapan *policy influencers* belum dilaksanakan oleh para pengambil keputusan, maka dapat diasumsikan beberapa atau keseluruhan dukungan dan/atau pengaruh *policy influencers* terhadap pengambil keputusan dapat hilang ataupun berkurang kadarnya. Tanggapan tuntutan oleh para pengambil keputusan tidak selalu menanggapi positif. Tetapi, para pengambil keputusan, akhirnya akan mengakomodir sampai di titik tertentu untuk bisa menegasikan tuntutan tersebut (Coplin, 1971).

Policy influencers menurut Coplin terdiri dari empat hal: (1) *Bureaucratic influencer*, merupakan sejumlah individu atau badan pada suatu instansi pemerintah yang mendampingi para pengambil keputusan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Elemen birokrasi seperti *policy influencers* terkadang termasuk dalam pihak pengambil keputusan. *Policy influencers* dapat menjangkau pembuat kebijakan dengan memberi tahu dan mendikte para pengambil keputusan dan menetapkan keputusan kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu, *bureaucratic influencers* mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan. (2) *Partisan influencers*, adalah suatu kelompok yang tujuannya menafsirkan keinginan publik sebagai aspirasi politik mengenai kebijakan pemerintah. Mereka mencoba mempengaruhi kebijakan dengan menekan mereka yang berkuasa dan memberikan suara kepada orang-orang pada pengambilan keputusan. Contohnya, partai politik dalam sistem demokrasi. (3) *Interest influencers*, yaitu beberapa orang yang bekerja sama atas dasar

kepentingan (*interest*) yang sepadan. *Interest influencers* menggunakan berbagai cara untuk membangun dorongan bagi kepentingan mereka. Mereka sering meluncurkan model dengan mengirimkan surat bukan hanya kepada pembuat kebijakan, tetapi juga kepada birokrat dan partisan yang berpengaruh. Mereka juga dapat memberikan harapan dukungan finansial atau memberi ancaman akan menariknya. Jika mereka tidak mempunyai peran pada penentuan kebijakan luar negeri, maka *Interest influencers* tentu mempunyai peran untuk memberikan kritikan pada pengambil keputusan kebijakan luar negeri. (4) *Mass influencer*, adalah para pemberi pengaruh dalam elemen masyarakat. Pembuat kebijakan menggunakan opini masyarakat tidak hanya merumuskan kebijakan luar negeri, tetapi menjadikannya rasional. Pembuat kebijakan sering mempertimbangkan masukan yang berasal dari kelompok ini saat merumuskan kebijakan luar negeri.

Policy Influencers tidak jarang mempunyai masukan yang sejalan terhadap pemegang kebijakan, namun bisa juga berseberangan. Ketidaksamaan ide juga bisa terjadi antara *policy influencers* dengan para *decision makers*. Untuk mengkaji korelasi di atas, Coplin mendiskripsikannya melalui gambar model pengambilan keputusan di bawah ini;



Gambar 1: Model Pengambilan Keputusan Kebijakan Politik Luar Negeri (W.Coplin, 1971)

Pada gambar di atas, lingkungan internasional berperan sebagai stimulan bagi para *decision makers* dan *policy influencers*. Panah silang di atas mewakili *input* untuk dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan kebijakan luar negeri dan *policy influencers*. Atas dasar perbedaan ide ataupun pendapat tentang kondisi internasional, maka keduanya mempunyai bagian yang berbeda dalam merespon sebuah fenomena. Dengan demikian, *policy influencers* akan berusaha untuk memberikan pengaruh kepada para pembuat keputusan melalui hubungan di bidang fenomena/isu yang diperlihatkan oleh tanda panah silang. Selanjutnya, panah lurus menandakan interaksi bidang fenomena/isu untuk dirumuskan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Pemerintah Australia terhadap Pencari Suaka pada periode 2010- 2013

Sepanjang kampanye pemilihan federal di tahun 2010, isu *boat people* dan pencari suaka (*asylum seeker*) yang datang dengan perahu dan tanpa dokumen perjalanan, telah menjadi isu utama kebijakan publik. Isu ini diangkat baik oleh Partai Buruh maupun partai Liberal-Koalisi Nasional. Kebijakan Gillard ketika berkuasa, terbukti menjalankan sikapnya terkait isu tersebut melalui pengesahan peraturan (Bill) 2012 tentang amandemen keimigrasian yang menjadikan *mainland* Australia tertutup sebagai zona pencari suaka yang datang menggunakan perahu dan tidak berdokumen. Otomatis para pencari suaka ini akan dibawa ke negara ketiga untuk proses penanganan selanjutnya (Claudia, 2017).

Perdebatan pencari suaka, terutama jika menyangkut *boat people*, selalu dilihat sebagai masalah yang penuh dengan kesalahpahaman di Australia. Pemerintah Australia beranggapan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang dengan perahu ke daratan Australia adalah sesuatu yang ilegal. *Asylum seeker* merupakan "someone who is seeking international protection but whose claim for refugee status has not yet been determined" (www.parlinfo.aph.gov.au, 2012). Pemerintah Australia mengidentifikasi pencari suaka, adalah mereka yang mencari proteksi internasional, namun status pengungsinya belum disetujui ataupun terdokumentasi secara sah. Sementara, pencari suaka ilegal didefinisikan sebagai "orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk masuk (misalnya, tanpa visa yang sah)". Akibatnya, *asylum seeker* yang menggunakan perahu ditetapkan ilegal oleh Australia karena tidak memiliki dokumen sah yang membenarkan tujuan ke Australia.

Namun, pelabelan pencari suaka dengan perahu oleh Australia sebagai ilegal tidaklah rasional dan bertentangan dengan kesepakatan internasional. UNHCR menegaskan bahwa seseorang yang akan menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk wajib dianggap sebagai pengungsi dan tidak diasumsikan sebagai pencari suaka ilegal. Sebagai ciri alami subjek yang bersangkutan, kemungkinan besar akan melarikan diri dengan memasuki negara tujuan secara ilegal dan/atau mempergunakan kredensial-dokumen ataupun surat yang berbeda. *Refugee Council of Australia* memberikan argumen serupa, dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dimungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan hak pengungsi karena cukup sulit untuk mengajukan visa atau kelengkapan perjalanan lain ke pemerintahan negara tersebut.

Meskipun Australia telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, tetapi sikapnya tetap tidak mempunyai keinginan untuk menyerahkan posisi hukum terhadap persoalan tersebut. Australia tetap berusaha menghindari atas kewajiban sebagai pihak penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 dengan tidak mengklasifikasikan fenomena *boat people* sebagai *asylum seeker* atau *refugee* (Santoso, 2004: 183).

Menanggapi masuknya *boat people*, pemerintah Australia telah menerapkan sejumlah ketetapan dengan maksud untuk mencegah pencari suaka yang dianggap ilegal. Beberapa dari kebijakan ini menganut prinsip "tidak ada keuntungan" dan pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah bahwa tidak ada gunanya pencari suaka mempertaruhkan segalanya dalam perjalanan berbahaya melintasi laut, karena pemerintah Australia tidak akan memberikan hak suaka. Pencari dan pengungsi berhak mendapatkan Akses (www.theage.com.au, 2011). Harapan pemerintah Australia dengan dikeluarkannya kebijakan ini, bertujuan untuk mencegah para pencari suaka pergi ke negaranya. Terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah Australia untuk menangani *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) meliputi: *Mandatory Detention*, *Malaysia Solution*, pengembalian pencari suaka ke negara asal, pemberlakuan *Bridging Visa*, serta *The Pacific Solution*.

Ditinggalkannya kebijakan *The Pacific Solution* oleh Pemerintahan Rudd di tahun 2008, telah berdampak sporadis dan meningkatnya secara signifikan kedatangan IMA yang tidak terdokumentasi (Lencznarowicz, 2018). Dengan demikian, penerapan kembali kebijakan-kebijakan tersebut di masa pemerintahan Gillard 2010-2013, menggambarkan hasil kebijakan yang mendapatkan dukungan dari tahapan politik. Hal tersebut juga mendapat pengaruh dari *input* yang ada di suatu negara. Penelitian ini akan menggunakan sistem pengaruh kebijakan William D. Coplin untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan kebijakan Australia dalam menangani pencari suaka.

Bureaucratic Influencer

Istilah *Bureaucratic Influencer* merupakan sejumlah individu atau badan dalam sebuah instansi pemerintah yang mendampingi pengambil keputusan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri (Coplin, 1992: 82). Elemen birokrasi adalah pengaruh kebijakan pada negara modern. Birokrasi merupakan jantung dari tahapan pembuatan kebijakan luar negeri di Australia (Gyngell & Wesley, 2007: 57). Ketika berhadapan dengan isu imigrasi, pemerintah Australia memiliki Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan (DIAC), yang menjaga perbatasan Australia untuk setiap

pencari suaka asing yang datang. Departemen tersebut menentukan perkembangan kebijakan imigrasi, dimana didalamnya terdapat kewenangan dalam penentuan legalitas pencari suaka yang menuju Australia.

Penanganan masalah kedatangan pencari suaka dengan perahu, perdana menteri (PM) dan menteri imigrasi Australia menyusun panel ahli pencari suaka. Tim panel ini mempunyai fungsi sebagai pemberi laporan tentang kebijakan yang dipilih pemerintah, dalam hal ini Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan. Tujuannya untuk membatasi para pencari suaka bertaruh nyawanya saat melakukan perjalanan penuh resiko ke Australia dengan menumpang perahu (kapal kecil). Panel tersebut dibentuk untuk memberikan nasihat tentang kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk menghentikan pencari suaka dengan perahu, berdasarkan prinsip "tidak ada keuntungan". Dengan prinsip tidak ada keuntungan atau *no preponderance* ini, pemerintah Australia mencoba mengeluarkan pesan kepada para pencari suaka, bahwa substansi kebijakannya adalah jangan berusaha mendapatkan perlindungan tanpa mekanisme yang disediakan karena akan sia-sia. Rekomendasi yang dibuat oleh kelompok ahli disusun dalam kerangka yang luas yang mencakup rekomendasi teknis untuk implementasi kebijakan. Kerangka tersebut disusun dalam 22 rekomendasi berdasarkan; 1) prinsip kebijakan, 2) pembangunan kapasitas regional, 3) program kemanusiaan tambahan di Australia, 4) kerja sama bilateral dengan Indonesia, 5) kerja sama pencari suaka dengan Malaysia, 6) perjanjian dengan negara asal pencari suaka, 7) mendapatkan persetujuan legislatif dalam konteks pemindahan pencari suaka ke negara lain, 8) mengembangkan rencana untuk memproses aplikasi dari pencari suaka Nauruan, 9) mengembangkan rencana untuk memproses aplikasi dari suaka Papua Nugini pencari, 10) kesepakatan antara Australia dan Malaysia, 11) keterlibatan jangka pendek dalam program kemanusiaan khusus, 12) keterlibatan jangka panjang dalam program kemanusiaan khusus, 13) koordinasi dengan negara tuan rumah lainnya, 14) untuk memperpanjang eksisi kebijakan untuk seluruh Australia, 15) Mereview "*refugee status determination*" (RSD), 16) Metode pengembalian dan penghapusan, 17) Mengalihkan perahu ke laut kembali, 18) Misi anti penyelundupan manusia, 19) *Disruption strategies*, 20) Operasi pencarian dan penyelamatan, 21) Korelasi kegiatan onshore dan offshore, 22) Melaksanakan penelitian berikutnya.

Di antara 22 rekomendasi tersebut, setidaknya beberapa di antaranya telah dilaksanakan oleh Australia. Kebijakan tersebut berdasarkan rekomendasi yang meliputi: mempromosikan Undang-Undang Pemrosesan

Regional, melakukan amandemen Undang-Undang Imigrasi untuk mengizinkan menteri untuk menyatakan negara ketiga sebagai negara pemroses regional yang tunduk pada persetujuan legislatif, memformalkan transfer dan pemrosesan *Memorandum of Understanding* (MOU) terkait imigrasi ke Nauru dan Papua Nugini, penarikan sukarela maupun paksa dari 500 pencari suaka yang di saring tanpa tuntutan perlindungan dari Australia, Nauru dan Christmas Island, menjembatani pembatasan visa bagi mereka yang datang dengan perahu per 2012-2013 dan mereka yang ditahan di Australia akan dipindahkan ke Papua Nugini atau Nauru. Menerapkan limitasi *visa bridging*, dimana dalam kebijakan ini termasuk tidak diberikannya hak untuk bekerja dan akses terbatas ke layanan perumahan dan dukungan keuangan, pergantian penawaran reunifikasi keluarga dan pengurangan akses ke reunifikasi keluarga atas dasar *Special Humanitarian Program* bagi pencari suaka yang tiba dengan perahu (Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs, 2010).

Terdapat beberapa usulan yang positif terhadap transformasi kebijakan pemerintah, misalnya penambahan jumlah tempat (posisi) dalam program kemanusiaan dan pengungsi yang sebelumnya 13.750, meningkat menjadi 20.000 pada kurun 2012-2013. Usulan lainnya seperti adanya peningkatan pembangun fasilitas yang sebesar \$10 juta. Tetapi, mayoritas rekomendasi juga menunjukkan bahwa pemerintah Australia dengan tanggung jawabnya kepada pencari suaka, cenderung memberikan hukuman kepada pencari suaka berdasarkan asal mereka tiba. Hal ini telah membuat citra negatif hukum internasional tentang pengungsi.

Partisan Influencer

Variabel Partisan Influencer memperhitungkan pandangan para pihak di Parlemen Australia saat menilai masalah *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs). Penjelasan ini berfokus pada dinamika partai selama Parlemen ke-43, pemerintahan 2010-2013, di mana terdapat 8 partai meraih suara di DPR. Pada pemilihan ini, Partai Buruh meraih 71 kursi dengan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, Partai Buruh berhak memimpin pemerintahan eksekutif. Koalisi oposisi terdiri dari lima partai politik, Partai Liberal Australia, Partai Nasional, Partai Liberal Negara, dan Partai Nasional Australia Barat. Lihat Tabel 3.1 untuk mengetahui komposisi suara partai politik pada Pemilu 2010.

Tabel 2. Jumlah Kursi pada House of Representative Australia mengacu pada partai

No.	Bidang	Partai	Kursi	Jumlah
1	Pemerintah*	Australian Labor Party (ALP)	71	71
		Liberal Party of Australia (LIB)	59	
2	Koalisi oposisi	The Nationals (the NATS)	11	72
		Country Liberal Party (CLP)	1	
		Nationals WA	1	
3	Crossbench	Australian Greens (AG)	1	1
		Independents (IND)	5	5
		Katter's Australian Party	1	1
Total			150	150

(Sumber: "Parliament Now"

http://www.peo.gov.au/students/now_parl_statss.html)

Dengan menguasai mayoritas kursi di DPR, Partai Buruh memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di parlemen Australia. Dengan demikian, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan putusan di Parlemen Australia. Namun, disebabkan sistem politik Australia adalah sistem parlementer Barat, peran koalisi oposisi yang dipimpin oleh Partai Liberal tidak dinafikan. Semua undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Partai Buruh) harus dipertanggungjawabkan dalam tanya jawab DPR dan dinilai langsung oleh koalisi oposisi yang bertindak sebagai kabinet bayangan.

Mengenai masalah *Irregular Maritime Arrivals*, Partai Buruh dan Partai Liberal tampaknya berdebat sengit tentang posisi mereka. Pemerintah Koalisi, melalui Tony Abbott dan Scott Morrison, mempromosikan kebijakan "*no documents, no entry*" untuk mencegah pencari suaka yang tidak berdokumen melintasi perbatasan Australia. Pada pernyataannya, Scott Morrison menjelaskan, pemerintah Koalisi secara tegas tidak mentolerir para pencari suaka yang menghilangkan dokumen mereka. Morrison pun mengatakan koalisi bertekad untuk tidak "bermurah hati" dengan pencari suaka yang masih berupaya melintasi perbatasan tanpa dokumen sah.

Menyikapi tindakan yang dimunculkan oleh pihak koalisi oposisi, Julia Gillard sebagai perwakilan Partai Buruh terlihat lebih teliti untuk menentukan sikap dan condong pada posisi di tengah di antara kebijakan "*tough policy*" dan "*sought policy*" yang menjadi *output* kebijakan Kevin Rudd. Terlihat ketika memberikan respon atas pernyataan tentang konsep "*no document no entry*" serta penghalauan perahu (*turn back the boat*) ke luar wilayah Australia yang berbunyi;

"If you are hard headed you're dismissed as hard hearted, if you are open hearted you're marginalized as supporting open borders. I say to those engaged in this type of rhetoric, stop selling our national character short, we are better than this, we are much better than this"

Penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya Gillard tampak enggan untuk memaksakan kebijakan pada pencari suaka yang dianggapnya terlalu tegas atau terlalu lembut. Dengan menerapkan fungsi kabinet bersama menteri dari partai yang sepemikiran, Gillard tampaknya kurang mendapat tekanan dari koalisi oposisi untuk mengajukan tuntutan kebijakan kepadanya. Gillard lebih memilih untuk bertindak berdasarkan kebijakan partainya sendiri untuk menentukan apa yang akan diberlakukan dengan IMA.

Interest Influencer

Kategori ketiga dari *Interest Influencer* adalah beberapa individu yang bekerja sama dilatarbelakangi kesamaan kepentingan. *Interest influencer* menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dukungan (*support*) terhadap kepentingannya (Coplin, 1992: 87). Dalam studi tersebut, para akademisi tidak mendapatkan data yang memperlihatkan adanya bagian kepentingan yang mendorong kebijakan terhadap pencari suaka. Fakta yang didapat adalah adanya sekelompok kepentingan yang tidak menginginkan kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah. Di antaranya Amnesty International yang merupakan kelompok kepentingan tersebut (www.amnesty.org.au/about, 2013).

Amnesty International secara teratur menyoroti dan mengkritik pemerintah atas perlakuannya terhadap pencari suaka, yang sering dianggap diskriminatif terhadap mereka yang tiba di Australia. Koordinator Pengungsi Australia Amnesty International, Graham Tom, memberikan kritik terhadap keputusan pemerintah karena tidak menghasilkan kebijakan pencari suaka yang maksimal dari periode yang lalu, tetapi hanya mengubah masalah pencari suaka menjadi kebijakan populis. Hal itu tercermin dalam pernyataan berikut;

"Put simply, this government is going backwards on its refugee policy, and fast. Rather than delivering the principled and humane approach it has repeatedly promised, we are seeing ill throughout announcements and stopgap solutions" (www.amnesty.org.au, 2013.)

Selain itu, kelompok tersebut sangat kritis terhadap kembalinya kewarganegaraan pencari suaka Afghanistan ke negara asal mereka dan langkah pemerintah untuk bekerja sama dengan

Timor Leste untuk memproses mereka. Selain kritikan tersebut, kelompok yang dimaksud telah membuat beberapa rekomendasi kepada pemerintah, antara lain: pemerintah diharuskan untuk menunda program wajib, program lepas pantai dan menghapuskan *detention center*, serta pencari suaka yang datang ke Australia diharuskan mendapat perlakuan yang adil dan setara, baik yang datang dengan perahu atau pesawat. Namun, pemerintah saat itu tidak menerapkan satu pun rekomendasi *Amnesty International* saat merumuskan kebijakan pencari suaka. Dapat disimpulkan, kelompok “interest influencer” tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap pembuatan kebijakan Australia terkait masalah “*Irregular Maritime Arrivals*”. Hal tersebut terlihat dari tidak munculnya respon pemerintah Australia terhadap rekomendasi yang disusun *Amnesty Internasional* dan *Refugee Council of Australia*. Hal ini dibuktikan dengan isi dan muatan kebijakan yang berbeda dibandingkan rekomendasi yang dikeluarkan.

Istilah pencari suaka ilegal merupakan konsep yang diusung oleh pemerintah Liberal di bawah John Howard (1996-2007) untuk mengkriminalkan para pencari suaka yang berusaha memasuki Australia (betts, 2001). Media menggunakan istilah tersebut untuk membentuk opini publik. Hal yang sama penggunaan referensi manusia perahu di media lainnya, dalam upaya untuk merendahkan para pencari suaka (Bowen, 2012). Media pun

Apa yang dilaporkan media Australia tentang pencari suaka dipandang mengaburkan batas antara kesesuaian lokal dan sekadar elemen yang membentuk opini publik. Pada tahun 2010, isu manusia perahu, atau yang disebut pemerintah sebagai kedatangan laut yang tidak teratur, menjadi perhatian utama warga Australia di tengah wacana politik dan liputan media. Tiga isu mendominasi pemilu federal 2010, salah satunya isu manusia perahu, dan dua isu besar lainnya adalah perubahan iklim dan kesehatan mental (Luzzi, 2011). Dari minggu pertama kampanye pemilu (17-23 Juli 2010) hingga terakhir (14-20 Agustus), tidak ada masalah demografis atau imigrasi yang masuk dalam 10 besar data yang dikumpulkan oleh subjek Monitor Media Australia, yang mencakup komputasi di semua media, yaitu berita, radio, televisi, dan internet (Goot & Watson, 2011). Hal itu memperlihatkan peran media yang signifikan untuk memformulasi opini masyarakat dalam melihat isu pencari suaka.

Dengan adanya berita penggunaan perahu untuk menyudutkan para pencari suaka, muncul tuntutan publik akan kebijakan yang keras terhadap orang-orang perahu. Tuntutan tersebut tercermin dalam survei yang dilakukan sejumlah media Australia. Berikut beberapa temuan yang menunjukkan masyarakat menginginkan pencari suaka diperlakukan.

Tabel 3. Perlakuan terhadap pencari suaka

Question	Right of asylum seekers to apply for residence	PM Gillard getting tough on asylum seekers	Offshore processing of asylum seekers	Federal govt. too tough/ soft	Suspension of processing	Right of asylum seekers to apply for residence	Handling of asylum issue	Policies of the Rudd govt.	Average
Survey	Morgan	Galaxy	Age/ Nielsen	Essential Report	Age/ Nielsen	Morgan	Essential Report	Essential Report	
Date	July 2010	July 2010	June 2010	April 2010	April 2010	March 2010	November 2009	May 2009	
Support tougher policy	64%	63%	62%	65%	58%	64%	52%	55%	60%
Retain current policy	26%	26%	33%	18%		26%	28%	26%	26%
Support softer policy				6%			9%	4%	6%
Do not know/ Other	10%	11%	5%	11%		10%	11%	15%	10%

Sumber: Markus, 2010. “Public Opinion Divided on Population, Immigration and Asylum”.

membuat diskusi publik tentang pengabaian hak-hak pencari suaka berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, media telah menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk memanipulasi dan mengarahkan opini publik terhadap pencari suaka.

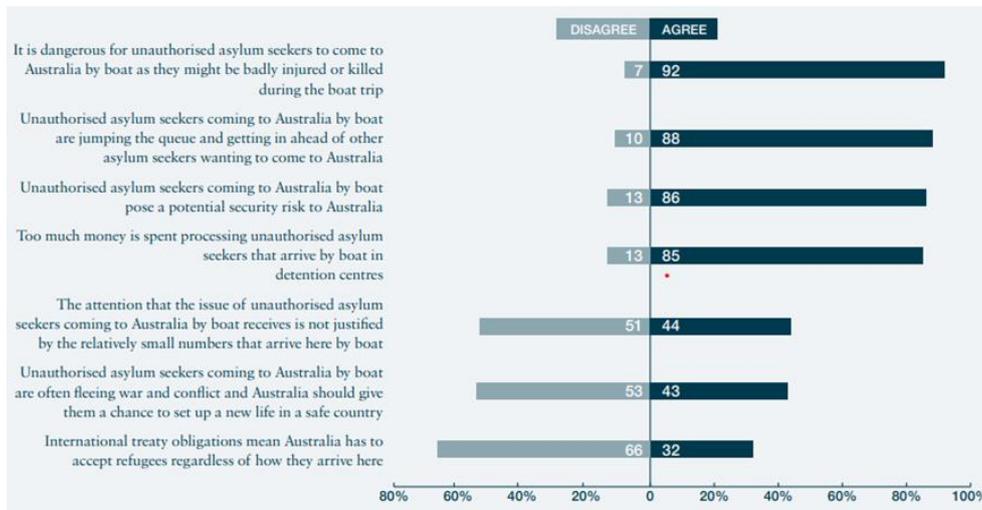
Dari tabel tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya mayoritas warga Australia tidak menolak kebijakan pemerintah yang ketat bagi pencari suaka. Survei yang dilakukan Galaxy pada Juli 2010, tercermin publik Australia mayoritas setuju atas pendirian Julia Gillard tentang tindakan yang lebih tegas terhadap pencari suaka, dengan

63% kekalahan mendukung opsi 'mendukung kebijakan yang lebih keras'. Sementara itu, 26% memilih kebijakan yang saat ini berlaku dan 6% memilih pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih lunak bagi pencari suaka. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas warga Australia menginginkan pemerintah mengambil tindakan lebih tegas terhadap isu pencari suaka.

Prejudice terhadap Pencari Suaka

Isu pencari suaka dengan perahu yang tiba di Australia telah menjadi isu domestik yang ada dibenak mayoritas warga Australia. Tetapi, para pencari suaka yang saat ini menggunakan perahu diyakini juga memiliki implikasi negatif terhadap keamanan domestik Australia. Ini tidak lepas dari fakta bahwa Australia dan media menggambarkan para pencari suaka dengan perahu merupakan pelanggar hukum serta bertindak tidak pantas untuk masuk ke Australia tanpa dokumen lengkap, sehingga hal tersebut menjadi stereotip pencari suaka. Grafik berikut menjelaskan argumentasi yang berbeda terhadap pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu.

Tabel 4. Sikap Pemerintah kepada Pencari Suaka



Sumber: Fergus Hanson, 2011

Dari grafik di atas, kita dapat menemukan beberapa penilaian terhadap pelabelan pencari suaka di masyarakat Australia. Seperti yang tergambar di atas, 86 persen pencari suaka yang tiba di Australia dianggap berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan. Lebih lanjut, 88 persen juga mengatakan pencari suaka yang menggunakan perahu ke Australia "melompati antrian" pencari suaka lainnya dalam menunggu pengajuan pencari suaka. Ini menunjukkan persepsi negatif tentang status pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu.

KESIMPULAN

Pemerintah Australia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggapi insiden *Irregular Maritime Arrivals*. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah antara lain *Pacific Solution*, kebijakan penahanan, penerbitan *bridging visa*, pemulangan pencari suaka ke negara asal, dan *Malaysian Solution*. Seluruh kebijakan pemerintah Australia yang diperkenalkan di bawah Julia Gillard cenderung sifatnya menghukumi atau menghukum para pencari suaka yang datang dengan perahu dan masuk ke Australia tanpa dokumen resmi. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Australia sebagai tanggapan atas derasnya arus kedatangan tidak teratur melalui laut antara tahun 2010 dan 2012.

Pemerintah Australia dalam membuat kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang mempengaruhinya. Di antara 4 faktor pengaruh kebijakan yang disebutkan dalam hipotesis, 3 berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dan hanya 1 yang tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah. Tiga faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan meliputi birokrasi, partisan dan massa. Sedangkan yang kurang berpengaruh yaitu faktor minat.

Faktor birokratis atau *bureaucratic influencer*, adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap formulasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Australia. Dalam hal *"Irregular Maritime Arrivals"*, Julia Gillard membentuk panel ahli yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah tentang skema kebijakan yang efisien dalam upaya mengurangi arus pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu. *Policy Influencers* kedua yang mempengaruhi pembuatan

kebijakan adalah partisan *influencer* atau *influencer* partai politik. Isu manusia perahu merupakan isu yang sensitif bagi warga Australia, sehingga keputusan yang diambil pemerintah mengenai isu ini seringkali bermuatan politis. Hal tersebut dikarenakan ingin menjaga dukungan konstituen yang menjadi instrumen signifikan untuk memastikan posisi partai di pemerintah, sehingga atas dasar tuntutan masyarakat pada saat itu, PM terpilih cenderung menjaga kebijakannya untuk tetap searah dengan *influencer* partai politik.

Berikutnya yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan Australia tentang IMAs adalah peran media dan pembentukan opini publik di masyarakat. Publik Australia prihatin dengan isu

manusia perahu. Pada pemilu federal 2010, isu manusia perahu yang diangkat oleh media tercatat sebagai tiga besar yang mendominasi pemilu federal. Dari pemberitaan banyak media Australia, yang terjadi selanjutnya adalah seruan masyarakat Australia agar pemerintah mengambil tindakan tegas. Beberapa faktor tersebut disebabkan oleh asumsi dan persepsi terhadap manusia perahu yang dinilai berasal dari kelompok luar masyarakat Australia, yang berdampak negatif bagi masyarakat Australia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bolger, Dawn Donghua. (2016). *Race politics: Australian government responses to asylum seekers and refugees from White Australia to Tampa*. Sydney: Western Sydney University
- Coplin, William D., (1971). *Introduction to International Politics*. Chicago: Markham Publishing Company
- Creswell, John W., (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (3rd ed.), USA: Sage Publication
- Demuth, Andreas. (2000). *Some Conceptual Thoughts on Migration*. Theoretical and Methodological Issues in Migration Research, edited by Biko Agozino, 21. Pennsylvania: Ashgate Publishing
- Kindborg, Johanna Hamark. (2014). *Australia's Securitization of Boat Refugees: A Critical Discourse Analysis of The Australia's Migration Act*, Human Right Studies, Lund University
- Santoso, M. Imam. (2004). *Perspektif Imigrasi: Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soutphommasane, Tim. (2002). *A more ethical and realistic conversation: the Australian debate about asylum seekers and refugees*. Sydney: St James Ethics Center, 2nd Edition.
- Lindh, M Hakansson. (2015). *Security Threat or a Fellow Human Being: A Critical Discourse Analysis of the Asylum Debate in the Australian Parliament*. Lund University.
- Sudjana Nana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Bandung.

Artikel Jurnal dan Lainnya

- Betts, Katharine. (2001). *Boat People and Public Opinion in Australia*. *People and place* vol. 9, no. 4 (2001): 34. <http://arrow.monash.edu.au/hdl/1959.1/480683>
- Carson, Andrea et al., (2016). *Wedge Politics: Mapping Voter Attitudes to Asylum Seekers*

Using Large-Scale Data during the Australian 2013 Federal Election Campaign. <https://doi.org/10.1002/poi3.128>

- Cameron, Matthew. (2013). From Queue Jumpers to Absolute Scum of the Earth: Refugee and Organised Criminal Deviance in Australian Asylum Policy. *Australian Journal of Politics and History*, <https://doi.org/10.1111/ajph.12014>
- Bowen, Chris. 2011. Government announces new and expanded immigration detention. Department Immigration and Citizenship. <http://www.minister.immi.gov.au/media/cb/2011/cb159679.htm>, diakses pada 25 Februari 2022.
- Claudia, Tazreiter. 2017. The unlucky in the 'lucky country': asylum seekers, irregular migrants and refugees and Australia's politics of disappearance, *Australian Journal of Human Rights*, 23:2, 242-260, DOI: 10.1080/1323238X.2017.1372039
- Gillard, Julia dan Bowen, Chris. "Transcript of joint press conference". Parliament Australia. <http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F1162009%22>.
- Gillard, Julia. "Statements on Indulgence Asylum Seekers". Parliament Australia. <http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fhansard%2F3e4e9532-bf3c-4623-bc6b-c0e926ad7cec%2F0116%22>.
- Grattan, Michelle. "Bowen policy to deter boats laden with risks". *the Age*. 23 November 2012. <http://www.theage.com.au/opinion/politics/bowen-policy-to-deter-boats-laden-with-risks-20121122-29stn.html>.
- Gyngell, Allan dan Wesley, Michael. 2007. *Making Australian Foreign Policy*, Second Edition. New York: Cambridge University Press
- Hanson, Fergus. 2011. *Australia and the World: Public Opinion and Foreign Policy*. The Lowy Institute Poll 2011.terdapat dalam http://lowyinstitute.cachefly.net/files/pubfiles/Lowy_Poll_2011_WEB.pdf.
- Hartley, Lisa K. & Anne Pedersen. 2015. *Asylum Seekers and Resettled Refugees in Australia: Predicting Social Policy Attitude from Prejudice Versus Emotion*, <https://doi.org/10.5964/jspp.v3i1.476>
- Minns, John et. al., 2018. *Australia's Refugee Policy: Not a Model for the World*, <https://doi.org/10.1177/0020881717746797>
- Submission on Strengthening Multiculturalism <https://www.refugeecouncil.org.au/wp>

- content/uploads/2018/12/Strengthening_multiculturalism.pdf
- Luzzi, Michela. 2011. Australia's 'Boat People': A Glimpse of the Big Picture". *Fair Observer*. 29 Agustus 2011. <http://www.fairobserver.com/article/australia-boat-people-glimpse-big-picture>.
- Markus, Andrew. 2010. Public Opinion Devided on Population, Imigration and Asylum. *Policiy Magazine Vol. 26 No. 3. Spring 2010*
- Phillips, Janet dan Spinks, Harriet. 2013. "Boat Arrival in Australia since 1976". Parliament of Australia, Department of Parliamentary Services.
- Tanzila, Elya. 2015. Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMA) Tahun 2001-2008. *JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, 2 Oktober 2015*
- United Nations. 2012. Who is a refugee?". UN High Commission for Refugee. Internet. terdapat dalam <http://www.unhcr.org>
- Weber, E., 2015. The Pacific Solution – A Catastrophe for the Pacific. *Environment and Ecology Research*, 3(4), 96–107. <https://doi.org/10.13189/eer.2015.030404>.